

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberi penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan yang dapat menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan otonomi di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif diberlakukan per Januari tahun 2001. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tersebut,

otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingannya pada masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya undang-undangan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Perwujudan kemandirian daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut melalui desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara, didefinisikan sebagai devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang terdapat dibawahnya, *sub-national levels of government*, seperti negara bagian, daerah, propinsi, kabupaten, dan kota (Hamid R. Davaodi, 2001). Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Pada fenomena di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal masing-masing daerah yang berbeda. Daerah yang kaya akan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah (PAD) yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, yang tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Penelitian oleh Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya perbedaan disparitas PAD tersebut mengakibatkan

ketimpangan fiskal antar daerah, daerah yang memiliki PAD besar akan mampu untuk mencukupi sebagian besar belanjanya, sebaliknya daerah dengan PAD *relative* kecil akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan belanjanya. Untuk mengatasi disparitas tersebut diperlukan campur tangan pemerintah pusat dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini merupakan subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Jumlah penduduk merupakan semua orang berdomisili di wilayah geografis publik Indonesia selama 6 bulan atau lebih karena mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi mereka bertujuan untuk menetap, baik yang produktif ataupun tidak produktif (Anata, 2008). Jumlah penduduk menunjukkan tinggi rendahnya pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di sertai dengan perubahan teknologi akan mendorong naiknya tabungan masyarakat, sehingga dapat menaikkan pendapatan asli daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan kegiatan daerahnya sendiri, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik, pemerintah berusaha meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Besar kecilnya pajak yang sangat ditentukan oleh PDRB, jadi PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah (Musgrave, 1993 dalam Prasedyawati, 2013:10). Salah satu faktor yang mempengaruhi PAD adalah pertumbuhan PDRB (Halim, 2001: 101). Menurut Clark dan Lawson pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan berarti akan secara langsung dapat mengurangi kemiskinan (Rahman, 2013), Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Prasedyawati, 2013).

Berdasarkan keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal menimbulkan implikasi mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. ialah dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan tersebut dengan tegas dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan, penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah. pengalokasian anggaran publik ini harus lebih diutamakan dari pada kepentingan publik, misalnya dalam belanja modal.

Sebagai anggaran publik, pengelolaan dan pengalokasian anggaran menempati posisi strategis dalam membangun suatu negara, termasuk anggaran daerah. Anggaran publik yang dikelola pemerintah dan terdapat tiga fungsi utama, yaitu; alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi, anggaran publik berperan sebagai pengalokasian anggaran dalam kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Fungsi distribusi tercermin dari pemerataan pendapatan dan pengetasan kemiskinan. Fungsi stabilitas tercermin dari penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan utama kebijakan fiskal pemerintah, baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran publik.

Berdasarkan dalam proses penyusunan sampai implementasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki berbagai masalah, salah satunya adalah pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntukan untuk kepentingan publik, baik alokasi dana untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Fozzard (2001) menunjukkan bahwa pengalokasian sumberdaya merupakan masalah mendasar dalam anggaran sektor publik. Ialah menunjukkan perlu adanya suatu desain sistem pengeluaran yang mampu mengendalikan pola konsumsi sumberdaya ekonomi, khususnya anggaran publik yang tidak tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dipandang relevan dewasa ini ialah manajemen pengeluaran sektor publik. Hal ini penting karena terdapat memiliki banyak pengeluaran pemerintah terutama pemerintah daerah, misalnya belanja modal rata-rata masih dibawah 30% dari yang disyaratkan. Permasalahan seputar alokasi

belanja tersebut menjadi lebih parah bila kewenangan pemerintah daerah secara mandiri pengelolaan keuangan daerahnya tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah.

Wujud dari desentralisasi fiskal ialah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Sejak diberlakukan reformasi keuangan daerah dan sejalan dengan implementasi otonomi daerah, sejumlah daerah tertentu tidak mampu membiayai

rumah tangga daerahnya akibatnya kapasitas fiskal rendah. berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diharuskan disajikan dan diperiksa setiap tahun. berarti struktur belanja setiap pemerintah daerah perlu dikuatkan supaya dapat mendorong perekonomian daerah. Halim (2001) menegaskan bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasan ini dapat menunjukkan bahwa bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu memperkuat struktur anggaran belanjanya, ialah bukan berarti daerah-daerah yang celah fiskal yang rendah tidak perlu memperkuat struktur belanja. Dengan memperkuat struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Terdapat sesuatu yang penting dikarenakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik. Alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan Saragi, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Terdapat Gagasan yang dikemukakan baik oleh Saragi maupun Stine menunjukkan bahwa pengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan suatu yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Dikatakan penting dan strategis karena dengan peningkatan sarana publik, Dapat membangun jembatan,

jalan dan dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis maupun nonbisnis.

Tabel 1.1 : Belanja Modal (DM) Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2015

Kabupaten / Kota	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	141604554,0	153158842,0	102776999,0	110028531,0
Lombok Tengah	121795362,0	209133554,0	202704233,0	206870798,0
Lombok Timur	145134017,0	272669553,0	227093606,0	152405339,0
Lombok Utara	140153123,0	165722734,0	146439962,0	140389580,0
Kabupaten Bima	119735290,0	189479317,0	202638055,0	183366169,0
Kabupaten Dompu	109555971,0	137041041,0	120607396,0	140409685,0
Kabupaten Sumbawa	106435594,0	100358852,0	103901421,0	134726806,0
Sumbawa Barat	141882279,0	379082194,0	114445972,0	103455181,0
Kota Bima	4435394,0	71612109,0	119525159,0	123556426,0
Kota Mataram	105378999,0	106369719,0	109581404,0	107736858,0

Sumber : BPS.DIY STATISTIK INDONESIA 2010-2015

Berdasarkan tabel 1.1, Berdasarkan informasi bahwa pada tahun 2012 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Belanja Modal (BM) terbesar, dengan jumlah Rp 145134017,0 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 4435394,0. pada tahun 2013 Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh Belanja Modal (BM) terbesar dengan jumlah Rp 379.082.194 sedangkan perolehan terkecil adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 71612109,0. pada tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Belanja Modal (BM) terbesar, dengan jumlah Rp 227093606,0 sedangkan perolehan terkecil adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 102776999,0. pada tahun 2015 Kabupaten Lombok

Tengah memperoleh Belanja Modal (BM) terbesar, dengan jumlah Rp 206870798,0 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Sumbawa Barat dengan jumlah Rp 103455181,0.

Tabel 1.2 : Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten & Kota Di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten & Kota	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	24443831,0	121539840,0	159069267,0	162437273,0
Lombok Tengah	18444760,0	20989726,0	140507906,0	134390302,0
Lombok Timur	18007658,0	33572969,0	180308182,0	225396550,0
Lombok Utara	35239930,0	35285970,0	81090502,0	79202817,0
Bima	43395393,0	69218673,0	100899000,0	109622429,0
Dompu	26297197,0	36420783,0	75094876,0	74348647,0
Sumbawa	61264145,0	69284522,0	116129384,0	124502839,0
Sumbawa Barat	31687428,0	40457633,0	42509446,0	20554421,0
Kota Bima	10156544,0	12275702,0	13665602,0	18392440,0
Kota Mataram	25877365,0	50150000,0	124539561,0	106892000,0

Sumber: BPS, *DIY Statistik Indonesia 2012-2015*

Dari tabel 1.2, Diperoleh informasi bahwa pada tahun 2012 Sumbawa memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, dengan jumlah Rp 612.641 45,0 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 101.565.44,0. pada tahun 2013 Kabupaten Lombok Barat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dengan jumlah Rp 121.539.840,0 sedangkan perolehan terkecil adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 12.275.702,0. pada tahun 2014 Lombok Tiumur memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, dengan

jumlah Rp 180.308.182,0 sedangkan perolehan terkecil adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 13.665.602,0. pada tahun 2015 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, dengan jumlah Rp 225.396.550,0 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kota Bima dengan jumlah Rp 18.392.440,0

Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini merupakan subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang. Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur.

Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2015

Kabupaten&Kota	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	100412	224586	334892,0	100412
Lombok Tengah	481686	203432	412879,0	481686
Lombok Timur	1130365	1153773	1164018,0	1130365
Lombok Utara	105064	110133	212265,0	105064
Kab. Bima	350976	463419	268682,0	350976
Kab. Dompu	226218	234665	238386,0	226218
Kab. Sumbawa	426128	436599	441102,0	426128
Sumbawa Barat	121167	129724	133391,0	121167
Kota Bima	148645	156400	159736,0	148645
Kota Mataram	119641	141064	350226	119641

Sumber: BPS, DIY Statistik Jumlah Dalam Angka 2010-2015

Tabel 1.3, Diketahui informasi bahwa pada tahun 2012 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Jumlah Penduduk (JP) terbesar, dengan jumlah 1.123.488 Juta Jiwa sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kota Bima dengan jumlah 106.307 Ribu Jiwa. pada tahun 2013 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Jumlah Penduduk (JP) terbesar dengan jumlah 1.130.365 Juta Jiwa sedangkan perolehan terkecil adalah Lombok Utara dengan jumlah 110.133 Ribu Jiwa. pada tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Jumlah Penduduk (JP) terbesar, dengan jumlah 1.153.773 Juta Jiwa sedangkan perolehan terkecil adalah Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah 110 133 Ribu Jiwa. pada tahun 2015 Kabupaten Lombok Timur memperoleh Jumlah Penduduk (JP) terbesar, dengan jumlah

1.164.018,0 Juta Jiwa sedangkan perolehan paling sedikit adalah Sumbawa Barat dengan jumlah 133.391,0 Ribu Jiwa.

Tabel 1.4 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Lombok Barat	1062497	1177543	2225747	2305833
Lombok Tengah	2597797	2704664	2828842	2962781
Lombok Timur	3411426	3608727	3892992	4132759
Lombok Utara	4402245	4723488	4094272	4388999
Kabupaten Bima	6777516	6833069	6175916	6606355
Kabupaten Dompu	7577199	8238697	8708308	7046787
Kabupaten Sumbawa	7997178	8476039	8511042	8616438
Sumbawa Barat	9149726	9890461	9083425	9649655
Kota Bima	14697657	10012345	11218818	11071628
Kota Mataram	10734563	11248644	11913551	10680375

Sumber : BPS.DIY STATISTIK INDONESIA 2010-1015

Berdasarkan tabel 1.4, Berdasarkan informasi bahwa pada tahun 2012 Kota Bima memperoleh PDRB terbesar, dengan jumlah Rp 1.4697.657 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah Rp 1.062.497. pada tahun 2013 Kota Mataram memperoleh PDRB terbesar dengan jumlah 11.248.644 sedangkan perolehan terkecil adalah Lombok Barat dengan jumlah Rp 1.177.543. pada tahun 2014 Kota Mataram memperoleh PDRB terbesar, dengan jumlah Rp 11.913.551 sedangkan perolehan terkecil adalah Lombok Barat dengan jumlah Rp 2.225.747. pada tahun 2015 Kota Bima memperoleh PDRB

terbesar, dengan jumlah Rp 11.071.628 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Lombok Barat dengan jumlah Rp 2.305.833.

Berdasarkan daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya yang dapat diandalkan, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam kebijakan Otonomi daerah disambut baik, dikarenakan terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerah secara mandiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu harapan dari kebijakan tersebut ialah daerah diberi kesempatan untuk percepat pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya, kebijakan demikian akan memberatkan daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya dalam keuangan atau dana yang melimpah akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabuten/Kota di Daerah Nusa Tenggara Barat 2010-2015)”**.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Devita, Andri; Delis,Arman; Junaidi, Junaidi. 2014). Namun perbedaannya ada pada kurun waktu penelitian dan tempat penelitian. Jika penelitian sebelumnya hanya dilakukan pada periode 2011, maka kali ini menggunakan data pada periode 2010-2015. Tempat penelitian sebelumnya

dilakukan di pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sedangkan kali ini penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kemungkinan untuk perkembangan penelitian sebagai berikut.

- 1) Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengaruh belanja modal di Provinsi NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima dan Kota Mataram)
- 2) Data yang digunakan adalah data time series yaitu pada tahun 2010-2015
- 3) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal
 - b. Pendapatan Asli Daerah
 - c. Jumlah Penduduk
 - d. Produk Domestik Regional Bruto

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) di NTB?
- 2) Bagaimana Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) di NTB?

- 3) Bagaimana produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) di NTB?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) di NTB.
- 2) Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Modal (BM) di NTB.
- 3) Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di NTB.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah

Dapat memerikan sumbangsih dalam menerapkan sistem perimbangan daerah yang baik untuk kedepannya bersama dengan tujuan otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiscal terwujud, karena tidak dapat terpungkiri selama 13 tahun pemerintah daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat dan hal ini dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan

Dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun anggaran di masa yang akan datang berkaitan dengan pengalokasian anggaran belanja modal.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masyarakat lebih berpartisipasi dalam mengembangkan perekonomian di daerah masing-masing

c. Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan kajian bahan referensi dan tambahan data bagi penelitian lainnya dan member kontribusi literature di bidang akuntansi sektor publik. Serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Serta merupakan persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi untuk mencapai gelar strata Satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Ilmu Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.